

## Strategi Manajemen Keuangan Berbasis Kemitraan Dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Yang Inklusif

Ihsan Iskandar, Khoiru Ajriani Nasution, Aqila Nashwa Shakila\*, Faiz Askar Abidi Lubis

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, Medan, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>ihsaniskandais@gmail.com, <sup>2</sup>khoiruajriani@gmail.com, <sup>3,\*</sup>anashwashaqila@gmail.com,  
<sup>4</sup>faizazkarabidilubis@gmail.com  
(\* : corressponding author)

### Abstrak

Pengembangan sektor pariwisata saat ini masih menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi dan akses permodalan yang belum merata bagi masyarakat lokal. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi komunitas dan melemahkan daya saing destinasi secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah merumuskan strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan guna mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa solusi utama untuk mengatasi masalah tersebut meliputi pembentukan skema pendanaan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu, program pendampingan literasi keuangan diperlukan untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan strategi ini terbukti mampu mengoptimalkan sumber daya, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global.

**Kata kunci:** Manajemen Keuangan, Pariwisata Inklusif, Pariwisata Berkelanjutan, Kemitraan, Literasi Keuangan

### 1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari peningkatan devisa negara, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perdagangan, perhotelan, kuliner, dan industri kreatif. Oleh karena itu, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia[1].

Di sisi lain, keberhasilan pembangunan sektor pariwisata tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki suatu daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Manajemen keuangan yang baik memungkinkan pemerintah maupun pelaku usaha mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki pelayanan kepada wisatawan, serta menciptakan inovasi dalam pengembangan destinasi wisata[2].

Namun demikian, pengelolaan keuangan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran pemerintah, rendahnya investasi swasta, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta minimnya akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat melalui kemitraan[3].

Kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, dan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pariwisata, kemitraan memungkinkan terjadinya sinergi dalam penyediaan pembiayaan, pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta promosi wisata. Melalui kemitraan yang baik, setiap pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya sehingga pembangunan pariwisata menjadi lebih efektif dan berkelanjutan[4].

Konsep pertumbuhan inklusif juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan sektor pariwisata. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pariwisata yang inklusif memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat secara aktif sebagai pelaku usaha, penyedia jasa, maupun tenaga kerja sehingga manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata[5].

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang inklusif melalui pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan[5].

mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) menyeleksi referensi berdasarkan relevansi dan kualitas sumber; (3) mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, seperti manajemen keuangan, kemitraan, daya saing pariwisata, dan pertumbuhan inklusif; serta (4) melakukan pencatatan dan sintesis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai referensi.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis berbagai sumber sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang inklusif[6]. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah[7].

## 2. TINJAUAN TEORITIS

### 2.1 Teori Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Brigham dan Houston (2022), manajemen keuangan berfokus pada pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset agar mampu meningkatkan nilai organisasi. Dalam sektor pariwisata, manajemen keuangan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan anggaran, tetapi juga mencakup pengelolaan investasi, pengendalian biaya operasional, diversifikasi sumber pendanaan, serta evaluasi kinerja keuangan destinasi wisata.

Pengelolaan keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Perencanaan anggaran yang tepat memungkinkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan sumber daya manusia, dan promosi destinasi wisata dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, strategi manajemen keuangan menjadi landasan utama dalam meningkatkan daya saing pariwisata.

### 2.2 Teori Kemitraan (Partnership Theory)

Kemitraan merupakan hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembangunan pariwisata, kemitraan melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, media, dan lembaga keuangan sebagai pemangku kepentingan utama.

Teori kemitraan menjelaskan bahwa kolaborasi antaraktor akan menghasilkan sinergi yang lebih besar dibandingkan jika setiap pihak bekerja secara terpisah. Kemitraan memungkinkan penggabungan sumber daya, baik berupa modal, teknologi, informasi, maupun keahlian, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan destinasi wisata. Melalui kemitraan, risiko investasi dapat dibagi, akses pembiayaan menjadi lebih luas, serta tercipta tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

### 2.3 Teori Daya Saing Pariwisata

Daya saing pariwisata adalah kemampuan suatu destinasi dalam menarik wisatawan, memberikan pengalaman yang berkualitas, serta menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Menurut model daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch, daya saing dipengaruhi oleh sumber daya destinasi, kualitas infrastruktur, kebijakan pemerintah, manajemen destinasi, serta dukungan lingkungan bisnis.

Peningkatan daya saing tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam atau budaya, tetapi juga oleh efektivitas pengelolaan keuangan, kualitas pelayanan, inovasi produk wisata, kemudahan akses, serta promosi yang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan berperan penting dalam memperkuat seluruh aspek yang mendukung daya saing destinasi wisata.

### 2.4 Konsep Pariwisata Inklusif

sosial Pariwisata inklusif merupakan konsep pembangunan pariwisata yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata tanpa adanya diskriminasi. Konsep ini menekankan pemerataan manfaat ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Pariwisata inklusif juga memperhatikan aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan.

### 2.5 Hubungan Manajemen Keuangan Berbasis Kemitraan dengan Daya Saing Pariwisata yang Inklusif

Strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan menjadi pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara kolaboratif dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran,

memperluas investasi, mendukung pengembangan UMKM pariwisata, serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan wisata. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat juga membuka peluang bagi terciptanya inovasi dalam pembiayaan dan pengelolaan destinasi. Dampaknya tidak hanya meningkatkan daya saing destinasi wisata, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, manajemen keuangan berbasis kemitraan menjadi strategi yang relevan dalam mewujudkan pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan merupakan faktor yang mampu meningkatkan daya saing pariwisata melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan menghasilkan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif, memberikan manfaat ekonomi yang merata, serta mendukung keberlanjutan destinasi wisata.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, strategi, serta implementasi manajemen keuangan berbasis kemitraan dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang inklusif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap fenomena sosial secara holistik melalui analisis berbagai sumber informasi yang relevan, bukan melalui pengujian hipotesis atau analisis statistik.

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding seminar, laporan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan manajemen keuangan, kemitraan, pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran publikasi agar hasil kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) mengidentifikasi literatur yang sesuai dengan fokus penelitian; (2) menyeleksi referensi berdasarkan relevansi dan kualitas sumber; (3) mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian, seperti manajemen keuangan, kemitraan, daya saing pariwisata, dan pertumbuhan inklusif; serta (4) melakukan pencatatan dan sintesis terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari berbagai referensi.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis berbagai sumber sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang inklusif. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian serta meminimalkan bias dalam proses interpretasi data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil kajian literatur, strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata yang inklusif. Pengelolaan keuangan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan serta mendukung pengembangan destinasi wisata.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat empat aspek utama yang berpengaruh terhadap peningkatan daya saing pariwisata, yaitu: (1) penguatan tata kelola keuangan, (2) pengembangan kemitraan multipihak, (3) peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, dan (4) pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari pembangunan pariwisata yang inklusif.

#### 4.1.1 Penguatan Tata Kelola Keuangan Pariwisata

Manajemen keuangan yang baik menjadi dasar keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Perencanaan anggaran yang matang memungkinkan pemerintah daerah maupun pengelola destinasi wisata menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan. Pengalokasian dana yang tepat dapat digunakan untuk pembangunan

ISSN 2962-7966 (media online)

Vol 4 No 1, Hal: 308-312

infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, promosi destinasi, serta pengembangan produk wisata.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Sistem pelaporan keuangan yang terbuka juga mampu mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran sehingga penggunaan dana menjadi lebih efektif dan efisien.

#### **4.1.2 Kemitraan sebagai Strategi Penguatan Pendanaan Pariwisata**

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat dalam mendukung pembiayaan sektor pariwisata.

Kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti investasi swasta dalam pembangunan fasilitas wisata, penyaluran kredit kepada UMKM pariwisata, program Corporate Social Responsibility (CSR), kerja sama promosi destinasi, hingga pelatihan pengelolaan usaha wisata.

Melalui kemitraan, sumber pendanaan menjadi lebih beragam sehingga pembangunan destinasi wisata dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN maupun APBD.

#### **4.1.3 Peningkatan Daya Saing Pariwisata**

Strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata. Pengelolaan dana yang efektif memungkinkan tersedianya infrastruktur yang memadai, seperti jalan menuju destinasi wisata, fasilitas umum, pusat informasi wisata, jaringan internet, serta sarana transportasi yang lebih baik.

Selain infrastruktur, kemitraan juga meningkatkan kualitas pelayanan melalui pelatihan bagi pelaku usaha wisata, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan teknologi digital dalam sistem reservasi, promosi, dan pemasaran destinasi wisata.

Destinasi yang memiliki fasilitas lengkap, pelayanan berkualitas, serta promosi yang efektif akan lebih mampu bersaing dengan destinasi wisata lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

#### **4.1.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pariwisata Inklusif**

Konsep pariwisata inklusif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan sektor pariwisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemitraan yang melibatkan masyarakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Masyarakat memperoleh kesempatan mengembangkan berbagai usaha seperti homestay, kuliner khas daerah, kerajinan tangan, jasa transportasi lokal, penyewaan perlengkapan wisata, hingga menjadi pemandu wisata. Kondisi tersebut menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar destinasi wisata.

Selain manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat juga meningkatkan rasa memiliki terhadap destinasi wisata sehingga mendorong upaya pelestarian budaya, lingkungan, dan sumber daya alam.

### **4.2 Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan daya saing pariwisata. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara kolaboratif menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan efektivitas pembangunan destinasi wisata.

Dari perspektif teori manajemen keuangan, keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengendalikan sumber daya keuangan. Dalam sektor pariwisata, kemampuan tersebut menjadi faktor penting karena pembangunan destinasi memerlukan investasi yang relatif besar dan berkelanjutan.

Sementara itu, teori kemitraan menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan satu organisasi, melainkan oleh sinergi berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan penyediaan infrastruktur, sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan inovasi, lembaga keuangan menyediakan akses pembiayaan, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam penyediaan produk dan jasa wisata.

Sinergi tersebut menghasilkan ekosistem pariwisata yang lebih kompetitif. Pengelolaan keuangan yang transparan meningkatkan kepercayaan investor sehingga peluang investasi semakin besar. Di sisi lain, dukungan

pembiayaan terhadap UMKM pariwisata meningkatkan kualitas produk lokal yang pada akhirnya memperkuat daya tarik destinasi wisata.

Dalam konteks pertumbuhan inklusif, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pembangunan pariwisata tidak hanya dinikmati oleh investor atau pemerintah, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Kesempatan memperoleh pekerjaan, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha mikro dan kecil, serta meningkatnya kualitas sumber daya manusia merupakan indikator bahwa pembangunan pariwisata telah berjalan secara inklusif.

Dengan demikian, strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada terciptanya tata kelola keuangan yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan daya saing pariwisata yang inklusif. Pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, komunitas, dan masyarakat mampu menciptakan sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Kemitraan tersebut juga memperluas sumber pendanaan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta mendukung pengembangan infrastruktur, promosi, dan inovasi destinasi wisata. Penerapan strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan, penguatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, serta pemberdayaan UMKM sebagai bagian penting dalam ekosistem pariwisata. Di samping itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata mendorong terciptanya pemerataan manfaat ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pelestarian potensi budaya dan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan pariwisata yang inklusif memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kemitraan yang sinergis. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung iklim investasi dan tata kelola keuangan yang baik, sektor swasta diharapkan meningkatkan partisipasi dalam investasi dan inovasi, sedangkan masyarakat perlu terus diberdayakan sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata. Dengan sinergi tersebut, strategi manajemen keuangan berbasis kemitraan dapat menjadi fondasi dalam menciptakan sektor pariwisata yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

## REFERENCES

- [1] P. Di and S. Utara, "Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan di Sumatera Utara," vol. 3, no. 3, pp. 234–238, 2026.
- [2] A. Soka, A. Suprojo, and A. Purwatiningsih, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pemerintah Kota Batu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," vol. 5, no. 2, pp. 98–105, 2025.
- [3] I. Kebijakan, A. Azhari, K. Mustofa, and A. Azhari, "An extended approach of weight collective influence An extended approach actor of weight collective influence graph for detection influence graph for detection influence c n e i e v i Pariwisata t h g Untuk i e w f o actor h c a o r p p of weight Pesisir approach r o t c a e c n e u l f d r o f h p a r g for detection influence," no. Dc, pp. 77–94.
- [4] O. S. Harini, M. Rian, and A. Morena, "Sistem Kemitraan Usaha Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Wujud Perekonomian Kerakyatan Republik Indonesia," vol. 29, no. 3, pp. 375–387, 2024.
- [5] A. T. Setyawan *et al.*, "Strategi Pengembangan Kepariwisata: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Dan Inklusif Di Indonesia," vol. 4, no. 1, pp. 76–89, 2026.
- [6] H. Ash-shiddiqi, R. W. Sinaga, N. C. Audina, R. Data, and D. Data, "Jurnal edukatif," vol. 3, no. 2, pp. 333–343, 2025.
- [7] J. G. Mulia, "No Title," vol. 15, no. 2, pp. 70–78, 2024.